

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

##### 1. Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sejak tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu pengetahuan sosiologi, antropologi dan psikologi serta cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Prancis, secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat.<sup>1</sup>

Paul Moedigdo Moeliono mendiskripsikan kriminologi sebuah masalah di dalam diri manusia. Kriminologi memiliki metode-metode sendiri dalam melakukan pendekatan dan menyelesaikan sebuah masalah kejahatan sebagai suatu gejala dalam kehidupan manusia, sehingga dapat berkembang penuh menjadi sebuah ilmu manusia yang berdiri sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta. Hal.9

<sup>2</sup> Ismail Rumadan. 2007. *Kriminologi*. Jakarta. Penerbit Airlangga. Hal.16.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Dalam teori kriminologi bahwa kejahatan merupakan gejala individual dan bahwa kejahatan adalah sebagai gejala sosial, merupakan dua konsep yang harus terus di kaji validitasnya. Ruang lingkup kriminologi yaitu Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

Menurut Bonger kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:<sup>4</sup>

- Antropologi kriminal : ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- Sosiologi kriminal : Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.
- Psikologi kriminal : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian

---

3

<sup>4</sup> Saherodji, Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta. Hal. 9

perseorangan (umpama) bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, bila dapat juga untuk menyusun Tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psychologikriminil dimana penyelidikanpsychologykriminil/sosial mengenai repercussisyang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa darri orang-orang lain dipengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta pengakuan seseorang.

- Psche dan Neure-pathologi kriminal : ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihinggapai sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- Penologi : ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.

Sutherland (1960) dalam buku Topo Santoso membagi kriminologi dalam tiga bidang ilmu, yaitu :<sup>5</sup>

1. Sosiologi hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah.

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, Eva Akhyani Zulfa. 2007. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Pesada. Jakarta. Hal. 9

2. Etiologi kriminal yang bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah.
3. Penologi artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, dan manfaatnya yang berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan (control of crime).

Bemmelen (1958) dalam Topo Santoso mengartikan kejahatan sebagai setiap kelakuan yang menimbulkan kegoncangan sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Pendapat Bemmelen tidak hanya membahas tentang kejahatannya saya akan tetapi juga penjatuhan hukuman bagi penjahatnya yang pada gilirannya berkembang menjadi ilmu pengetahuan tersendiri yang dinamakan dengan penologi. Alasan pembenaran pemberian hukuman didasarkan pada teori tentang penghukuman yang terdiri dari teori besar, yaitu :<sup>6</sup>

1. *Retribution*, bahwa pelaku kejahatan harus membayar kerugian atas perbuatannya yang telah membuat orang lain menderita. Teori ini memiliki saudara kembar yaitu teori expiation yaitu menekankan pada inisiatif untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan si pelanggar hukum seolah-olah datang dari si pelaku, tetapi yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 14

menentukan hukuman tetap pihak lain diluar dirinya, yaitu hakim. Perbedaannya adalah teori retribution diartikan bahwa pihak yang dirugikan yang mekasa pelaku untuk membayar, sedangkan *expiation* di artikan seolah-olah pelaku sendiri yang berinisiatif membayar.

2. *Utilitarian Prevention : Deterrence*, yaitu pencegahan pelanggaran hukum dengan manfaat melalui penolakan. Mengartikan bahwa seseorang akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan apabila melihat hukuman yang keras. Aspek manfaat dari hukuman yang diharapkan dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu general deterrence yaitu upaya menakut-nakuti orang banyak yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum dengan memberikan pengetahuan tentang kerasnya hukuman bagi seorang penjahat, *special deterrence* yaitu upaya menakut-nakuti pelanggar hukum yang sedang atau telah dihukum untuk tidak melakukan pelanggaran kembali dengan memberinya hukuman yang keras atau membuat mereka menderita.
3. *Special deterrence : Intimidation*, mengartikan bahwa hukuman harus bermakna bagi suatu upaya penolakan khusus terhadap pelaku, yakni berwujud sebagai suatu intimidasi. Mengartikan bahwa pelaku pelanggaran hukum yang menerima hukuman akan mengalami penderitaan yang hebat

sehingga membuatnya menjadi kapok untuk berbuat jahat kembali.

4. *Behavioral prevention : incapacitation*, bahwa hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum seyogyanya harus memiliki manfaat untuk mencegah kejahatan melalui medium atau perantara perubahan perilaku dari si pelanggar hukum. Tujuan pemberian hukuman adalah agar si pelanggar hukum tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan lagi, konsep berpikir dari teori ini adalah bahwa pelanggar hukum yang dinilai memiliki kemungkinan besar untuk mengulangi perbuatannya akan dibuat tidak berdaya.
5. *Behavioral prevention : rehabilitation*, teori ini menekankan pada cara atau upaya mengamankan masyarakat melalui perubahan kepribadian pelaku. Teori ini mempunyai tujuan yakni merubah kepribadian dari pelanggar hukum menjadi taat hukum melalui rehabilitasi.

## **2. Teori Penyebab Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti

sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)<sup>7</sup>

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>8</sup>

Secara etiologis terdapat beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah:

---

<sup>7</sup> Suharso, Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. CV. Widiya Karya. Hal.196

<sup>8</sup> M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 11-12

- a. Berdasarkan pendekatan teori biologis menjelaskan sumber kejahatan melalui terjadinya proses biologis.
- b. Berdasarkan pendekatan teori psikologis menjelaskan pendekatan kejahatan bersumber dari kepribadian yang bermasalah dan tekanan jiwa.
- c. Berdasarkan pendekatan teori sosiologi menjelaskan kejahatan disebabkan proses sosial, interaksi sosial, dan struktur sosial yang ada di masyarakat.<sup>9</sup>

Kejahatan dapat ditimbulkan secara endogen ataupun secara eksogen:

*a. Endogen*

Faktor *endogen* adalah dorongan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bahwa kebenaran relatif itu relatif dapat menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang dinilai menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar.

*b. Eksogen*

Faktor *eksogen* adalah faktor-faktor dari luar yang menjadi pengaruh akan timbulnya kejahatan. Faktor eksogen ini sangat

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hal. 125.



kompleks dan bervariasi, misalnya dapat berupa kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan kecacatan sistem hukum.<sup>10</sup>

Kejahatan menurut Sutherland merupakan sebuah perilaku yang dilarang oleh hukum nasional. Hukum nasional bereaksi dengan sanksi pidana sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kejahatan<sup>11</sup>.

Menurut Abdulsyani dalam melihat kejahatan dapat dilihat melalui aspek yuridis, sosial, dan ekonomi. Secara yuridis orang dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana secara sadar atau tidak maka seorang tersebut adalah penjahat. Secara sosial seseorang yang melakukan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat baik secara sengaja atau tidak maka orang itu adalah penjahat. Secara ekonomi seseorang membuat orang lain merasa dirugikan maka orang tersebut adalah penjahat.<sup>12</sup>

Para pakar kriminologi menyimpulkan kejahatan adalah penyimpangan terhadap hukum pidana dan norma yang harus diatasi. Oleh karena itu dapat diketahui perhatian kriminologi mengenai kejahatan adalah:

- a. Adanya putusan bersalah terhadap pelaku secara sah;
- b. Penyelesaian non penal ada white collar crime;
- c. Deskriminalisasi suatu perilaku;

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Yesmil Anwar. 2014. *Kriminologi*. Bandung. Penerbit PT Refika Aditama. Hal. 179

<sup>12</sup> Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Bandung. Penerbit CV. Pustaka Setia. Hal 115

- d. Populasi tahanan;
- e. Perbuatan menyimpangi norma;
- f. Reaksi sosial atas suatu tindakan.<sup>13</sup>

Berikut adalah teori timbulnya suatu kejahatan disebabkan oleh banyak hal, diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Biologis

Berdasarkan teori ini, faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir melalui gen dan keturunan yang dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku, misalnya dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Selain itu pelaku kejahatan juga memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang, karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, melainkan hanya sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan.<sup>14</sup>

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru,

---

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika. Hal. 78-79

<sup>14</sup> Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta. Penerbit Ombak. Hal. 19

konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.<sup>15</sup>

c. Teori Subkultural Delikueni

Berdasarkan teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Indah Sri Utmai. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. Hal. 48

<sup>16</sup> Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Bandung. Pustaka Setia. Hal. 121-122

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal. Sumber pertama yaitu karena faktor intern diri pelaku, seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, dan masalah hiburan individu. Sedangkan faktor yang kedua ialah faktor ekstern, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri pelaku seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.<sup>17</sup>

J.E Sahetapy memberikan gambaran tentang latar belakang seseorang yang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Manovier, kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Maka pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang. Jadi menurut Maniovier kejahatan dan penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolak ukurnya.<sup>19</sup>

Adapun faktor-faktor lain penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan, yaitu:

#### 1. Teori Mental Disorder

---

<sup>17</sup> Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remaja Karya. Hal 44-45

<sup>18</sup> J.E Sahetapy. 1983. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya. Sinar Wijaya. Hal.82

<sup>19</sup> Topo Santoso, Eva Achjan Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 25

Philippe Pinel mengatakan bahwa berkisar antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu tipe mental disorder (kekacauan mental). Pada dewasa ini penyakit mental tersebut dianggap sebagai *psychopathy* atau *antisocial personality* – suatu kepribadian yang ditandai oleh ketidakmampuan seseorang belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak pernah merasa bersalah.<sup>20</sup>

Menurut Sondang Irene E, dan kawan-kawan menyatakan bahwa pengalaman traumatis mengguncangkan dan melemahkan pertahanan individu dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Gejala-gejala ini sangat wajar muncul pada orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut. Artinya bahwa siapapun berkemungkinan untuk menampilkan reaksi berlebihan akibat pengalaman yang begitu mengejutkan, menakutkan, mengancam, menyedihkan sehingga menimbulkan stress dan trauma<sup>21</sup>.

Cavanagh, dalam Mental Health Channel, mendefinisikan trauma adalah suatu peristiwa yang luar biasa, yang menimbulkan luka atau perasaan sakit: namun juga sering diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit “berat” akibat suatu kejadian “luar biasa” yang menimpa seseorang, secara langsung maupun tidak langsung, baik luka fisik maupun psikis atau kombinasi dari keduanya. Berat ringannya suatu peristiwa akan dirasakan berbeda oleh setiap orang,

---

<sup>20</sup> *ibid.* Hal. 50

<sup>21</sup> Dr. kusmawati Hatta. 2016. *Trauma dan Pemulihannya*. Banda Aceh : Dakwah Ar-Rainy Press. Hal 1

sehingga pengaruh dari peristiwa itu terhadap perilaku juga berbeda antara seorang dengan yang lainnya.<sup>22</sup>

## 2. Teori Labeling

Labeling adalah identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. Labeling cenderung diberikan pada orang yang memiliki penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Seseorang yang diberi label akan mengalami perubahan peranan dan cenderung akan berlaku seperti label yang diberikan kepadanya (Dirdjosisworo, 1994).<sup>23</sup>

Menurut sosiolog Edwin Lemert (1912-1996) stigma tercipta karena adanya primary deviance dan secondary deviance. Apabila seseorang telah dicap atau dijuluki sebutan tertentu oleh masyarakat sekitarnya (primary deviance), maka kelak bisa menjadi kenyataan karena kerap dijuluki demikian (secondary deviance).<sup>24</sup>

Respon masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat memunculkan stigmasi terhadap individu yang melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan tersebut. Stigma tersebut muncul dikarenakan adanya rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana kekhawatiran akan mempengaruhi orang untuk melakukan perbuatan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hal 19

<sup>23</sup> Erianjoni. 2015. *Pelabelan orang minangkabau pada pelaku penyimpangan sosial*. Jurnal. Vol. XIV No.1. halaman 2

<sup>24</sup> Hilda Mianita, Mayanisa Nurjannah, dkk. 2020. *Dampak Stigmatisasi Terhadap Keluarga Narapidana DI Lingkungan Sekolah*. Jurnal : Universitas Islam Riau

melanggar hukum. Sehingga dalam kekhawatiran itu maka perilaku masyarakat dalam berinteraksi kepada mantan narapidana ini akan sedikit dijauhi.<sup>25</sup>

Berdasarkan teori tersebut dapat penulis katakan bahwa pemberian cap atau label oleh masyarakat kepada seseorang akan membawa perubahan perilaku dalam seseorang yang mendapat label buruk itu. Sehingga seseorang yang mendapatkan cap buruk dari masyarakat ini akan cenderung melakukan penyimpangan perilakunya menjadi seperti apa yang dilabelkan masyarakat kepada dirinya.

### 3. Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori oleh A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang pada intinya mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- 2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

---

<sup>25</sup> Rusdianto Dwi Apriono. 2018. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian*. Skripsi : Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar

4) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.<sup>26</sup>

#### 4. Teori Peranan Korban

Menurut Von Henting bahwa ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat. Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila. Secara sadar atau tidak sadar bahwa korbanlah yang sering merangsang orang lain untuk berbuat jahat.<sup>27</sup>

Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Masalah mengenai peran korban ini bukan merupakan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu yang kurang diperhatikan bahkan diabaikan sehingga menjadi “bumerang” pada diri korban sendiri. Maka perlu kehati-hatian seseorang pada setiap tindakan yang dilakukannya agar tidak salah arah yang akan berujung merugikan dirinya sendiri.

#### 5. Teori Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Akibat rendahnya pendidikan maka akan menyebabkan seseorang juga memiliki kekurangan dalam

---

<sup>26</sup> Soejono, D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni. Bandung. Hlm. 42.

<sup>27</sup> Ninik Widiyanti. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*. Jakarta. Bina Aksara. Hal 133.



hal wawasan dan pemahaman, sehingga ia dalam melakukan tindak pidana pencabulan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Residivis**

### **1. Definisi Residivis**

Secara tipologis residivis berasal dari Prancis yaitu *re* yang berarti lagi dan *cado* yang berarti jatuh. Maka residivis adalah perbuatan yang identik dengan kejahatan yang dilakukan berulang-ulang kali.<sup>29</sup>

Menurut M Marwan residivis adalah orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindakan pidana yang serupa. Penjahat kambuhan, orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana, tapi ia pernah dijatuhi pidana karena salah satu tindak pidana, seseorang yang telah melakukan kejahatan dan telah dijatuhi hukuman dan telah dijalani, kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberat hukuman.<sup>30</sup>

Barda Nawawi dalam buku Hukum Pidana karangan Zainal Abidin, residivis adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana melalui putusan Hakim dan kemudian melakukan suatu tindak pidana kembali. Kemudian Made Widyanti berpendapat bahwa residivis terjadi ketika seseorang telah melakukan

---

<sup>28</sup> Paramita Dwinada Putri. 2018. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>29</sup> Gerson W Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Penerbit Pradnya Primata, Hal. 68

<sup>30</sup> M Marwan. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya. Hal. 273

perbuatan pidana dan telah mendapat putusan Hakim bersalah dalam jangka waktu tertentu setelah masa tahanan berakhir seseorang tersebut kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>31</sup>

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat di bagi menjadi dua jenis, yakni :<sup>32</sup>

a. Residive umum :

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- 2) Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah di jalani.
- 3) Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan.
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum.

b. Residivis khusus :

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- 2) Telah dijatuhi hukuman.
- 3) Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan.
- 4) Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis. Dari perbuatan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya.

---

<sup>31</sup> Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 431-432

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 123

## 2. Jenis Residivis

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis residivis, yaitu: <sup>33</sup>

- a. Residivis Umum (*General Recidive*) Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asalkan residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.
- b. Residivis Khusus (*Special Residive*) Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residue tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

## 3. Teori Pengulangan Kejahatan Tindak Pidana

Berdasarkan doktrin hukum pidana, dikenal adanya bentuk pengulangan tindak pidana, diantaranya:

- a) *Accidentale recidive* (pengulangan kebetulan), yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.

---

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) *Habituele recidieve* (pengulangan kebiasaan), yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah memiliki *inner criminal situation* yang berarti tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.<sup>34</sup>

Selain berdasarkan doktrin hukum pidana diatas, Clemmer juga menyebutkan bahwa Prisonisasi adalah sosialisasi didalam. Dimana dampak prisonisasi ini dapat mengubah *the first offender* menjadi seorang criminal yang tangguh karena selama menjalani kehidupan dalam penjara, *the first offender* mempunyai kesempatan untuk melakukan pembelajaran kejahatan. Pembelajaran kejahatan ini dilakukan melalui proses interaksi dan komunikasi dengan pelaku kriminal yang mempunyai pengalaman lebih tinggi dalam melakukan kejahatan.<sup>35</sup>

Bersadarkan kutipan tersebut penyebab atau faktor seseorang menjadi residivis dikarenakan pada saat didalam lembaga pemasyarakatan ia berinteraksi dengan sesama pelaku kejahatan yang bisa saja mempunyai pengalaman lebih tinggi dalam hal kejahatan sehingga pada saat keluar dari lembaga pemasyarakatan dan seorang mantan narapidana itu mendapat penolakan dari masyarakat maka mantan narapidana itu akan cenderung untuk melakukan kejahatan kembali, baik kejahatan itu sama seperti kejahatan yang sebelumnya

---

<sup>34</sup> Prof. Masruchin Ruba'i. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang. Media Nusa Creative. Halaman 233

<sup>35</sup> Ahmad Hudzaifi. 2017. *Prisonisasi dan Pembelajaran Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

ia lakukan atau kejahatan baru yang ia pelajari selama berinteraksi dengan pelaku kejahatan yang lebih tinggi itu.

Berkaitan dengan pendapat Muladi, apabila seorang narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan selalu diperlakukan hukuman, baik hukuman fisik maupun hukuman bathiniah, maka setelah keluar dari penjara ada kemungkinan akan dapat menjadi penjahat yang kelasnya menjadi lebih hebat atau kejam dikarenakan membawa dendam dan akan menjadi momok mengerikan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat tentu menjadi trauma dalam menerima bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari<sup>36</sup>.

Hal ini tentunya juga menjadi faktor bagi seorang bekas narapidana untuk melakukan tindak pidana lagi setelah keluar dari lembaga Pemasyarakatan. Dengan banyaknya hukuman yang didapat selama menjalani masa hukuman membuatnya merasa lebih kuat dan lebih arogan terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta menjadikan masyarakat juga enggan untuk menerima dan berinteraksi dengan bekas narapidana itu.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan**

### **1. Definisi Pencabulan**

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada

---

<sup>36</sup> Muhammad Wahyu Darmasny. 2014. *Pengulangan Kejahatan atau Residiv (analisis kriminologis dan sosiologis di Lemabaga Pemasyarakatan kelas I Makassar 2008-2014)*. Skripsi : UIN Alauddin Makassar. Makassar

orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. KUHP belum mendefinisikan secara jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata ‘persetubuhan’ disamping kata perbuatan cabul tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, karena perstubuhan berarti telah terjadi overspel yakni masuknya kemaluan laki-laki ke dalam vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya memuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul.<sup>37</sup>

Menurut simmons yang dikutip dalam bukunya lamintang “*ntuchtige handeligen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>38</sup>

Jenis jenis perbuatan pencabulan diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana sebagai berikut :

- a. Pencabulan dengan kekerasan : Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat

---

<sup>37</sup> Hamzah Hazan. 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (cet aluddin universitypress) hal.184

<sup>38</sup> Ari Saputra. 2019. *Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Kakek Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Hal, 32

mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau senjata, hal ini diatur dalam Pasal 289 KUHP dengan hukuman penjara sembilan tahun.

- b. Pencabulan dengan cara membujuk : Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun, bahwa dia belum pantas untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul tindakan perbuatan cabul dengan membujuk diatur dalam KUHP Pasal 290 dipidana penjara selama 7 tahun.
- c. Pencabulan dengan seseorang berdaya pingsan : Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang itu menjadi lumpuh.<sup>39</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Secara awam, anak merupakan seseorang yang lahir dari proses reproduksi antara seorang pria dan wanita yang telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan dan harus dilindungi dari kejahatan apapun yang akan mengganggu atau menghambat perkembangannya.

Menurut R.A. Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak perlu diperhatikan secara

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>40</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>41</sup>

Setiap anak telah di jamin perlindungannya oleh negara sehingga tidak boleh ada satupun suatu bentuk kejahatan yang dapat menghambat tumbuh dan kembang anak terlebih lagi jika kejahatan tersebut dapat membahayakan keselamatannya.

Definisi perlindungan anak sendiri telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2014, Pasal 1 angka 2 yang mana bahwa : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Arif Gosita. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 28

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Dalam islam hak-hak anak juga cukup banyak diatur di Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang mana hak-hak tersebut harus terpenuhi dan dijaga oleh orang tua ataupun orang lain yang ada disekitarnya. Hak-hak tersebut diantaranya ialah :

- a. Hak mendapatkan perlindungan : hak anak yang paling utama adalah mendapatkan perlindungan terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai tuhan;
- b. Hak untuk hidup : hak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hak eksistensi manusia, yaitu hak asasi, dimana hak tersebut telah melekat semenjak lahir dimuka bumi ini;
- c. Hak anak-anak terhadap pengasuhan yang baik : sudah sepantasnya orang tua memberikan pola pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya, dan mampu menafkahi anak-anaknya;
- d. Hak anak-anak mendapatkan keadilan dan persamaan dalam interaksi : keadilan dan persamaan dalam pandangan islam menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan anak, keadilan dan persamaan dalam hal ini bukan dalam artian ketika kebutuhan anak perempuan disamakan dengan kebutuhan anak laki-laki, namun yang dimaksud dengan keadilan dan persamaan adalah menempatkan sesuatu pada porsinya masing-masing;
- e. Hak mendapatkan pendidikan : mendidik anak sangat penting, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan yang diberikan

dirumah terutama pendidikan mengenai agama dan pendidikan budi pekerti akhlaqul karimah.<sup>43</sup>

#### **E. Upaya Penanggulangan**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>44</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> HM Budiyo. 2014. *Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam*. Jurnal. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 2.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama. Hal. 45.

Berdasarkan pendapat tersebut maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” ( penindasan/pemberantasan / penumpasan ) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>46</sup>

### **1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan lewat jalur penal juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>47</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan. Di

---

<sup>46</sup> Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hal. 188

<sup>47</sup> Ibid. Hal. 46

samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat atau kebencian sosial yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial”. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa kebijakan “hukuman merupakan” bagian integral dari “kebijakan pertahanan sosial”.<sup>48</sup>

Berdasarkan teori diatas dapat di simpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat baha hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan karena mengerti bagaimana akibat hukumannya.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Dimana aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 182.

memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum<sup>49</sup>.

Penggunaan sarana pidana berarti menggunakan upaya paksa yang dimiliki hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.<sup>50</sup>

Mengenai sarana penal dalam suatu peradilan, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana<sup>51</sup>

Menurut Phillips dalam bukunya *A First Book English Law*, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, yang dipandang sebagai tujuan pembedaan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggaran hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Hal tersebut terakhir yang

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 224.

<sup>50</sup> Merdjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas Toleransi)*. Jakarta. Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Makalah. Hlm. 1.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya. Hlm.9

paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>52</sup>

## **2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)**

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dengan sarana “penal” yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan), tetapi juga dilakukan dengan sarana non penal (bukan/diluar hukum pidana), yang bersifat preventif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian). Pendekatan non penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>53</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan lewat jalur non penal disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal. 16

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 159

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama. Hal. 46.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>55</sup>

Sehingga berdasarkan teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal dilakukan karena sarana penal memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagaimana dikemukakan oleh para pakar antara lain:

- a. Rubin, menyatakan bahwa pembedaan apapun hakikatnya dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki hanya sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan;
- b. Karl O. Christiansen, menyatakan bahwa kita mengetahui pengaruh pidana penjara terhadap di pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (general

---

<sup>55</sup> M. Hamdan.1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 20

prevention) merupakan terra in cognita atau suatu wilayah yang tidak diketahui (unknown territory);

- c. S. R. Brody, menyatakan bahwa dari Sembilan Penelitian mengenai pembedaan, lima diantaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (reconviction).
- d. Bassioni pernah menegaskan bahwa kita tidak tahu atau tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap tindakan itu untuk menjawab masalah-masalah secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini tidak memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.<sup>56</sup>

Mendasari keterbatasan-keterbatasan sarana penal tersebut menunjukkan adanya kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut hakikat berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai masalah sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi seperti yang pernah

---

<sup>56</sup> Widiada Gunakarya SA. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung. Amico. Hal. 36



dikemukakan Sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (Kuren am Symton) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> Aminanto. 2017. *Politik Hukum Pidana I*. jember. Kertamedia. Hal.59